

# **RENCANA KERJA**

**TAHUN 2019**




**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun Anggaran 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan RKT OPD ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

	<p>Painan, Februari 2018 Kepala Dinas</p> <p><b>Drs. SUARJIS, M.Si</b> NIP. 19610324 198603 1 004</p> 
--	---

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019</b>	<b>7</b>
<b>BAB III</b>	<b>: RENCANA KERJA TAHUN 2019</b>	<b>23</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>30</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat OPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.



Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Tahunan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjebatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen RKT sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RKT OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017**

Berisikan uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

**BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2019**

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan 2018, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017**

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## 2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 dengan 7 (tujuh) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.098.899.191,- dan terealisasi sebesar Rp.2.013.726.467,- atau 95.94 % dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki 17 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 720.065.000,- dengan realisasi Rp.691.767.385,- persentase keuangan 96,07 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa lancarnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.350.000,- dengan realisasi Rp.46.344.612,- persentase keuangan 82,24 %, keluarannya berupa terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasilnya yaitu meningkatnya pelayanan aparatur.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.400.000,- dengan realisasi Rp.55.705.000,- persentase keuangan 99,38 %, keluarannya berupa terlaksananya honor pengelola program / kegiatan, hasilnya yaitu lancarnya pelaksanaan program / kegiatan kantor.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.609.500,- dengan realisasi Rp.13.163.000,- persentase keuangan 96,72 %, keluarannya berupa terciptanya kebersihan lingkungan kantor, hasilnya yaitu meningkatnya kebersihan kantor.

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.700.00,- dengan realisasi Rp.10.680.000,- persentase keuangan 99,81 %, keluarannya



berupa terlaksananya pemeliharaan peralatan, hasilnya yaitu berfungsinya peralatan kantor secara optimal.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.470.500,- dengan realisasi Rp.31.906.000,- persentase keuangan 98,26 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian alat tulis kantor, hasilnya yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.350.000,- dengan realisasi Rp.45.274.000,- persentase keuangan 99,83 %, keluarannya berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan, hasilnya berupa meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.092.500,- dengan realisasi Rp.8.061.700,- persentase keuangan 99,62 %, keluarannya yaitu terlaksananya pembelian / pemasangan komponen instalasi listrik, hasilnya berupa tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.582.000,- dengan realisasi Rp.63.801.211,- persentase keuangan 97,28 %, keluarannya berupa penambahan sarana dan prasarana kantor, hasilnya yaitu terlaksananya pembelian peralatan kantor.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.200.000,- dengan realisasi Rp.18.270.000,- persentase keuangan 90,45 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian bahan bacaan, hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan aparatur tentang informasi terbaru.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.375.000,- dengan realisasi Rp.23.225.000,- persentase keuangan 99,36 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian makanan dan minuman, hasilnya yaitu adanya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 266.665.000,- dengan realisasi Rp.264.598.823,- persentase keuangan 99,23 %, keluarannya berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, hasilnya yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.025.000,- dengan realisasi Rp.69.274.250,- persentase keuangan 94,86 %, keluarannya berupa koordinasi dan konsultasi dalam daerah, hasilnya yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

## **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 365.555.200,- dengan realisasi Rp.353.540.486,- persentase keuangan 96,71 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa pengadaan kendaraan dinas roda 2 serta terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

### **a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.850.000,- dengan realisasi Rp.20.799.000,- persentase keuangan 99,76 %, keluarannya berupa terpeliharanya gedung kantor, hasilnya yaitu terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor.

### **b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional**

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.201.200,- dengan realisasi Rp.46.237.486,- persentase keuangan 83,76 %, keluarannya berupa terpeliharanya kendaraan dinas kantor, hasilnya berupa terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor.

### **c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor**

### **d. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas**

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp.44.431.364,- persentase keuangan 98,74 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa ikutsertanya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengikuti pendidikan / pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu:

#### **a. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp.44.431.364,- persentase keuangan 98,74 %, hasilnya berupa keikutsertaan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengikuti pendidikan / pelatihan, hasilnya yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

### **4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 306.369.500,- dengan realisasi Rp.305.204.727,- persentase keuangan 99,62 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya promosi dan kegiatan pameran investasi.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu:



a. Promosi Investasi di Dalam Negeri

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.942.000,- dengan realisasi Rp.229.847.323,- persentase keuangan 99,53 %, keluarannya berupa terlaksananya keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada pameran investasi, hasilnya yaitu meningkatnya investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini yaitu melakukan promosi dengan cara ikut serta pada pameran- pameran seperti Festival Langkisau, Sumbar Expo, Pesona Ranah Minang dan pameran-pameran lainnya.

**5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 323.273.191,- dengan realisasi Rp.305.240.441,- persentase keuangan 94,42 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga ke 15 Kecamatan, terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKPM Provinsi, Terlaksananya Operasional Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yaitu:

a. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.387.500,- dengan realisasi Rp.27.085.500,- persentase keuangan 98,90 %, keluarannya berupa terselenggaranya pendataan investasi non fasilitas Rumah Tangga, hasilnya tersedianya data investasi non fasilitas dan rumah tangga.

Kegiatan ini yaitu melakukan pendataan investasi non fasilitas dan Rumah Tangga ke kecamatan-kecamatan kemudian di buat menjadi sebuah buku yang berisikan data-data investasi non fasilitas dan rumah tangga.

b. Koordinasi Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.660.000,- dengan realisasi Rp.50.221.930,- persentase keuangan 95,37 %, keluarannya koordinasi bidang penanaman modal ke BKPM RI, hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan di Bidang Penanaman Modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi ke BKPM Provinsi maupun ke BKPM Pusat mengenai penanaman modal.

c. Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.624.640,- dengan realisasi Rp.50.052.790,- persentase keuangan 79,93 %, keluarannya berupa terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal, hasilnya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal.

Kegiatan ini yaitu melaksanakan pelayanan penanaman modal, melakukan survey lapangan bersama tim teknis perizinan untuk mengecek / merekomendasi permohonan perizinan penanaman modal yang diajukan.

d. Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.472.920,- dengan realisasi Rp.44.642.650,- persentase keuangan 61,60 %, keluarannya berupa terlaksananya penyusunan buku perkembangan investasi, hasilnya yaitu tersedianya buku data perkembangan investasi.

Kegiatan ini yaitu mengumpulkan data-data perkembangan investasi yang kemudian dibuat menjadi sebuah buku data perkembangan investasi.

e. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.074.118,- dengan realisasi Rp.73.805.330,- persentase keuangan 91,03 %, keluarannya berupa terlaksananya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, hasilnya yaitu adanya buku Rencana Umum Penanaman Modal.

Kegiatan ini yaitu menyusun sebuah buku Rencana Umum Penanaman Modal yang berisikan data-data potensi penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan naskah akademiknya melibatkan pihak ketiga yaitu tim ahli (akademisi) dari unand. Rencana Umum Penanaman Modal ini kemudian dijadikan perbup Rencana Umum Penanaman Modal. Kegiatan ini terlaksana yaitu berupa adanya Perbup mengenai Rencana Umum Penanaman Modal.

f. Pembuatan Buku Profil Investasi

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.863.700,- dengan realisasi Rp.52.910.150,- persentase keuangan 84,17 %, keluarannya yaitu tersedianya buku profil investasi.

Kegiatan ini berupa penyusunan buku profil investasi Kabupaten Pesisir Selatan. Buku ini menggambarkan potensi-potensi unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu berupa adanya buku profil investasi yang telah dicetak dan diperbanyak.

g. Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.655.998,- dengan realisasi Rp.23.947.800,- persentase keuangan 71,15 %, keluarannya berupa terlaksananya pembinaan dan penyuluhan penanaman modal, hasilnya terbina dan terlaksananya penyuluhan penanaman modal kepada perusahaan-perusahaan.

Kegiatan ini berupa pembinaan atau penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan atau investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.357.398,- dengan realisasi Rp.28.796.848,- persentase keuangan 79,20 %, keluarannya berupa terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

i. Pemanfaatan Program Aplikasi SICANTIK

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 94.819.800,- dengan realisasi Rp.73.770.600,- persentase keuangan 77,80 %, keluarannya



berupa terselenggaranya pemanfaatan aplikasi SICANTIK, hasilnya yaitu tersedianya data investasi yang baik.

Kegiatan ini berupa pelatihan untuk mengoperasikan aplikasi perizinan yang dibuat oleh Kementerian Kominfo (SICANTIK).

j. **Pembangunan Sistem Pelayanan Prima**

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.950.000,- dengan realisasi Rp.55.049.600,- persentase keuangan 96,66 %, keluarannya berupa terselenggaranya pembangunan sistem pelayanan prima, hasilnya yaitu tersedianya sistem pelayanan prima.

Kegiatan ini berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan manajemen mutu berupa pelatihan untuk memperoleh ISO 9001 : 2015.

**6. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.**

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 338.635.500,- dengan realisasi Rp.313.542.064,- persentase keuangan 92,59 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa peningkatan pelayanan publik bidang perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Adapun kegiatan pada Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan yaitu:

a. **Operasional Penyelenggaraan Perizinan**

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.658.100,- dengan realisasi Rp.177.687.114,- persentase keuangan 93,69 %, keluarannya

berupa terselenggaranya penerbitan izin sesuai dengan SOP, hasilnya yaitu terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan transparan.

Kegiatan ini yaitu kegiatan pelayanan perizinan dan cetak blanko-blanko izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.190.000,- dengan realisasi Rp.62.163.800,- persentase keuangan 88,57 %, keluaranya berupa terpantau / terbinanya perusahaan yang telah habis masa berlaku izinnya, hasilnya yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Kegiatan ini yaitu melakukan monitoring terhadap usaha-usaha yang akan atau telah habis masa berlaku izinnya, dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang telah memperjang izinnya.

c. Sosialisasi Perbup No. 29 Tahun 2015 dan SOP

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.479.506,- dengan realisasi Rp.74.877.450,- persentase keuangan 95,41 %, keluaranya berupa terlaksananya sosialisasi perbup nomor 29 tahun 2015, hasilnya yaitu adanya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang perizinan.

Kegiatan ini berupa sosialisasi yang pesertanya terdiri dari pegawai kecamatan, wali nagari, pengusaha dan masyarakat umum.

## **7. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal**

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 142.133.396,- dengan realisasi Rp.71.901.200,- persentase keuangan 50 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya Publikasi Perizinan dalam bentuk Billboard, leaflet pamflet dan brosur.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal yaitu:

### **a. Publikasi Perizinan Penanaman Modal**

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.133.396,- dengan realisasi Rp.71.901.200,- persentase keuangan 50 %, keluarannya berupa pencetakan media informasi pelayanan perizinan, hasilnya yaitu meningkatnya informasi penanaman modal.

Kegiatan ini berupa pembuatan media informasi perizinan berupa leaflet, pamflet, brosur dan Billboard.

## **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 1.848.924.800 terurai dalam 6 Program dan 28 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 95 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai “**Pelayanan Perizinan**”.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.



**TABEL 2.4**  
**Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	Rancangan awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan				
	URUSAN/BIKING URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANAI/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	URUSAN/BIKING URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANAI/PAGU INDIKATIF
1	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	DPMPPTSP	Lancarnya Operasional Kantor	797.151,100	APBD	Rutinitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	DPMPPTSP	Lancarnya Operasional Kantor	963.157,070
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	DPMPPTSP	Lancarnya Pelaksanaan Program/Kegiatan	90.200,000	APBD	Rutinitas	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	DPMPPTSP	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiatan	50.000,000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPMPPTSP	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	18.781,800	APBD	Rutinitas	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPMPPTSP	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	95.328,000
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMPPTSP	Computer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	16.720,000	APBD	Rutinitas	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMPPTSP	Service Computer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	202.710,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPPTSP	Lancarnya Operasional Kantor	38.964,600	APBD	Rutinitas	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPPTSP	Lancarnya Operasional Kantor	47.583,250
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPPTSP	Lancarnya Operasional Kantor	49.885,000	APBD	Rutinitas	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPPTSP	Lancarnya Operasional Kantor	18.392,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	DPMPPTSP	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	17.797,200	APBD	Rutinitas	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	DPMPPTSP	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	83.550,000

8	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perengkapan kantor	DPMPPTSP	Almari Ascip, Meja, Kursi, Meja rapat,	75,760,000	APBD	Rutinitas	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perengkapan kantor	DPMPPTSP	Almari Ascip, Meja, Kursi, Meja rapat,	21,356,640
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	DPMPPTSP	4 eksp koran	16,720,000	APBD	Rutinitas	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	DPMPPTSP	4 eksp koran	54,873,500
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Makanan Minum Rapat dan Tamu Kantor	43,257,500	APBD	Rutinitas	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Makanan Minum Rapat dan Tamu Kantor	46,757,520
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	DPMPPTSP	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	168,925,000	APBD	Rutinitas	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	DPMPPTSP	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	70,848,000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah bagi Apartur Kantor	DPMPPTSP	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	79,440,000	APBD	Rutinitas	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	DPMPPTSP	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	99,220,000
13	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya Honorarium Penjaga Kantor dan Pramu Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	50,000,000	APBD	kegiatan berkelanjutan tiap tahun	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Terbayarnya Honorarium Penjaga Kantor dan Pramu Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	22,538,160
14	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	DPMPPTSP	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	65,000,000	APBD	Baru	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	DPMPPTSP	Tersedianya Operasional perencanaan	65,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				462,822,400			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				596,464,480
15	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor	DPMPPTSP	Unit	85,000,000	APBD	kegiatan baru	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor	DPMPPTSP	tersedianya kebutuhan Peralatan & Perengkapan	90,000,000
16	Pengadaan Mobilieur	Tersedianya kebutuhan meublieur	DPMPPTSP	Unit	85,000,000	APBD	kegiatan baru	Pengadaan Mobilieur	Tersedianya kebutuhan meublieur	DPMPPTSP	tersedianya kebutuhan meublieur	97,000,000

17	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	1 Paket	60,000,000	APBD	Rutinitas	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	335,500,000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Penambahan Gedung Kantor untuk Pelayanan	Tersedianya Penambahan Ruangan	25,020,000	APBD	Kegiatan Baru	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya tambahan bangunan	83,940,480
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya 1 unit Gedung dan Halaman Kantor	1 Paket	69,950,400	APBD	Rutinitas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit Gedung dan Halaman Kantor	30,024,000
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	1 unit kend. Roda 4 dan 1 unit kend. Roda 2	222,852,000	APBD	Rutinitas	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	50,000,000
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			113,000,000			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		125,000,000
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	34,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas	35,000,000
23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	45,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	55,000,000
24	Pengadaan Pakaian Khusus pelayanan	Tersedianya Pakaian untuk pelayanan	Tersedianya Pakaian untuk pelayanan	34,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Pengadaan Pakaian Khusus pelayanan	Tersedianya Pakaian untuk pelayanan	35,000,000
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			140,000,000			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		160,000,000
26	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monev	Tersedianya Monev	90,000,000	APBD	Kegiatan baru	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monev	95,000,000
27	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Perizinan	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Formal	50,000,000	APBD	Rutinitas	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Formal	65,000,000
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,715,600,000			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1,755,100,000



26	Promosi Investasi di Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi	Luar Daerah	Promosi Investasi	Luar Daerah	Terlaksananya Promosi Investasi	609,500,000
27	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	Terciptanya kerjasama investasi	150,000,000
28	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tercapainya pengembangan produk unggulan	Pessel	Pengembangan potensi unggulan daerah	Pessel	Tersebarinya informasi potensi unggulan daerah	-
29	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid.p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tercapainya kerjasama dengan investor	Pessel	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid.p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Pessel	Tercapainya kerjasama dengan investor	80,000,000
30	Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan	Terlaksananya Sosialisasi pada UKM	2 Kecamatan	Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan	2 Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi pada UKM	-
31	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya Pameran Investasi	Pessel	Penyelenggaraan pameran investasi	Pessel	Terlaksananya Pameran Investasi	600,000,000
32	Pelayanan kerjasama investasi	Terlaksananya Kerjasama Investasi	Pessel	Pelayanan kerjasama investasi	Pessel	Terlaksananya Kerjasama Investasi	-
33	Pembuatan Buku Saku, Panflet, Brosur Investasi dan Perizinan	Tersedianya buku informasi	Pessel	Pembuatan Buku Saku, Panflet, Brosur Investasi dan Perizinan	Pessel	Tersedianya buku informasi	80,000,000
34	Informasi dan data Perizinan	Tersedianya informasi data perizinan	Pessel	Informasi dan data Perizinan	Pessel	Tersedianya data informasi	155,600,000
35	Pendataan Investasi UMKM	Terlaksananya Pendataan UMKM	3 Kecamatan	Pendataan Investasi UMKM	3 Kecamatan	Terlaksananya Pendataan UMKM	80,000,000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					3,221,796,288



36	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersedianya Sistem Informasi penanaman modal daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	APBD	Berkelanjutan	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersedianya Sistem Informasi penanaman modal daerah	Kab. Pessel	200,000,000
37	Kajian Kebijakan penanaman modal	tersedianya peraturan daerah	Kab. Pessel	1 (satu) buah perda	APBD	Baru	Kajian Kebijakan penanaman modal	tersedianya peraturan daerah	Kab. Pessel	180,000,000
38	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	Terlaksananya sistem perizinan	Kab. Pessel	Aplikasi	APBD	Baru	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	Terlaksananya sistem perizinan	Kab. Pessel	150,000,000
39	Penyederhanaan Perizinan Investasi	Terseleenggaranya penyederhanaan bahan izin	Kab. Pessel	5 kelengkapan pengurusan izin	APBD	Baru	Penyederhanaan Perizinan Investasi	Terseleenggaranya penyederhanaan bahan izin	Kab. Pessel	75,000,000
40	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	Kab. Pessel	1 buah	APBD	Baru	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	Kab. Pessel	150,000,000
41	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitas layanan	Kab. Pessel	20 Badan usaha	APBD	Berkelanjutan	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitas layanan	Kab. Pessel	80,556,000
42	Promosi dan publikasi Peluang Investasi	Terlaksananya Promosi dan Publikasi Peluang Investasi	Luar Daerah	2 Kali	APBD	Rutinitas	Promosi dan publikasi Peluang Investasi	Terlaksananya Promosi dan Publikasi Peluang Investasi	Luar Daerah	200,000,000
43	Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi	Tersedianya Buku Data Perkembangan Investasi	Pessel	50 Buku	APBD	Rutinitas	Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi	Tersedianya Buku Data Perkembangan Investasi	Pessel	125,000,000
44	Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan pada investor	Pessel	5 investor	APBD	baru	Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan pada investor	Pessel	38,500,000
41	Lokakarya penyusunan LKPM	Terlaksananya lokakarya	Kab. Pessel	30 Peserta investor	APBD	Baru	Lokakarya penyusunan LKPM	Terlaksananya lokakarya	Kab. Pessel	59,895,600
42	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	APBD	Baru	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	114,120,840
43	Pembuatan buku profil dan potensi investasi	Tersedianya Profil Potensi Investasi	IV Jurai	50 Buku	APBD	Rutinitas	Pembuatan buku profil dan potensi investasi	Tersedianya Profil Potensi Investasi	IV Jurai	75,600,000

44	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan Investasi	Kab. Pessel	10 Investor	95,600,000	APBD	Berkelanjutan	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan Investasi	Kab. Pessel	105,160,000
45	Pembangunan Sistem Pelayanan Prima	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi Izh	96,500,000	APBD	lanjutan	Pembangunan Sistem Pelayanan Prima	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	106,150,000
46	Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordinasi investor	Kab. Pessel	2 Investor	79,450,800	APBD		Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordinasi investor	Kab. Pessel	87,395,880
47	Sosialisasi Kepada Investor dan UMKM	Terlaksananya Sosialisasi kepada Investor dan UMKM	Pessel	60 Peserta UMKM	150,000,000	APBD	Rutinitas	Sosialisasi Kepada Investor dan UMKM	Terlaksananya Sosialisasi kepada investor dan UMKM	Pessel	165,000,000
48	Gelar Potensi dan Temu Usaha	Terlaksananya Gelar Potensi dan Temu Usaha	Pessel	30 orang temu usaha	65,000,000	APBD	Rutinitas	Gelar Potensi dan Temu Usaha	Terlaksananya Gelar Potensi dan Temu Usaha	Pessel	71,500,000
49	Inventarisir Data Peluang Investasi	Tersedianya Data yang akurat tentang Peluang Investasi	Pessel	Data Investasi	250,000,000	APBD	Rutinitas	Inventarisir Data Peluang Investasi	Tersedianya Data yang akurat tentang Peluang Investasi	Pessel	275,000,000
50	Tersedianya Kendaraan Operasional dan Kendaraan Pelayanan	Terlaksananya operasional pelayanan	Pessel	Layanan perizinan	700,000,000	DAK	Baru	Tersedianya Kendaraan Operasional dan Kendaraan Pelayanan	Terlaksananya operasional pelayanan	Pessel	350,000
51	Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	Tersedianya Data Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	Pessel	15 Kecamatan	45,000,000	APBD	Rutinitas	Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	Tersedianya Data Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	Pessel	49,500,000
52	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Dasar Hukum bagi kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Pessel	1 Paket		APBD	Rutinitas	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Dasar Hukum bagi kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Pessel	200,000,000
53	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	Tersedianya informasi perizinan	Pessel	Layanan perizinan	114,120,840	APBD	baru	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	Tersedianya informasi perizinan	Pessel	125,532,924
54	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal	Terselenggaranya pemberian insentif	Pessel	baru	350,000,000	APBD	baru	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal	Terselenggaranya pemberian insentif	Pessel	400,000,000
55	Fisibility study Potensi Investasi Penanaman Modal	Terlaksananya study investasi	Luar Daerah	baru		APBD	baru	Fisibility study Potensi Investasi Penanaman Modal	Terlaksananya study investasi	Luar Daerah	185,000,000

7	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan	503,177,400	APBD	lanjutan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan	471,714,010
56	Survey index kepuasan masyarakat	150 orang	Pessel	lanjutan	Survey index kepuasan masyarakat	39,390,398
57	Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 dan SOP Pelayanan	80 orang	4 Kecamatan	lanjutan	Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 dan SOP Pelayanan	-
58	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	50 Izin	Pessel	lanjutan	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	107,323,612
59	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	30 peserta	kecamatan	lanjutan	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	35,000,000
60	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	5 permasalahan	kecamatan	baru	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	50,000,000
61	Operasional Penyelenggara Perizinan	1500 bahan layanan Izin	Pessel	lanjutan	Operasional Penyelenggara Perizinan	240,000,000
62	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal	1,237,500,000	APBD	baru	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal	546,000,000
63	Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi	3 Investor	Pessel	baru	Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi	75,000,000
64	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	80 peserta	Pessel	lanjutan	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	115,500,000
65	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	5 buah informasi	Pessel	lanjutan	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	100,000,000
66	Penyusunan SOP	1 buah	Pessel	lanjutan	Penyusunan SOP	155,500,000
	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	1 buah	Pessel	baru	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	-



67	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Balihho Informasi	Pesrel	6 buah	450,000,000	APBD	baru	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Balihho Informasi	Pesrel	Tersedianya Balihho Informasi	100,000,000
	TOTAL				8,163,594,980			TOTAL				7,839,231,848





**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2018**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat capaian realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wajib Non Pelayanan Dasar									
1 02 03 01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 02 03 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1 02 03 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayernya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1 02 03 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1 02 03 01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1 02 03 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

1	02	03	01	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1	02	03	01	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1	02	03	01	17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1	02	03	01	18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1	02	03	01	20	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbnyarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1	02	03	02		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (luar negri)	Terbnyarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1	02	03	02	09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbnyarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	03	02	10	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	03	02	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	02	03	02	24	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
1	02	03	02	26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										





1	02	03	16	68	Pengembangan System Informasi Pelayanan melalui jaringan Aplikasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	16	69	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17		Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordniasi bidang penanaman modal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	05	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	06	Survey index kepuasan masyarakat	Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	07	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	08	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	17	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	tercapainya penuntasan masalah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	21	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%
1	02	03	17	22	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal									
1	02	03	17	23	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN DPMPPTSP**

#### **3.1 Tujuan dan Telaahan terhadap kebijakan nasional**

##### **a. Tujuan**

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategi lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Memperjelas arah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Memberikan transparansi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengadakan evaluasi kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi.
5. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan aparatur negara.

### **3.2 Sasaran, Rencana Kerja DMPPTSP**

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran strategis yang difokuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dalam proses pelayanan.
2. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
3. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.

6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah..
12. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.
13. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
14. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

**II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
5. Pengadaan Moubiller.

**III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

**IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
2. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian Khusus pelayanan.

**V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

1. Promosi Investasi di Dalam Negeri
3. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi  
PMDN/PMA

4. Pengembangan potensi unggulan daerah
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
6. Sosialisasi penyelenggara perizinan
7. Pengembangan potensi unggulan daerah
8. Penyelenggara pameran investasi
9. Pelayanan kerjasama investasi
10. Pembuatan bukusaku, pamflet, brosur investasi dan perizinan
11. Informasi dan data perizinan
12. Pendataan investasi UMKM

**VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

1. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
2. Kajian kebijakan penanaman modal
3. Pengembangan sistem perizinan nasional
4. Penyederhanaan perizinan investasi
5. Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional
6. Pelayanan penanaman modal
  1. Promosi dan publikasi peluang investasi
  2. Penyusunan buku data perkembangan investasi
3. Pembinaan dan Penyuluhan penanaman modal
4. Lokakarya penyusunan LKPM
5. Pengembangan System informasi penanaman modal
6. Pembuatan buku profil dan potensi investasi
7. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
8. Pembangunan sistem pelayanan prima
9. Koordinasi bidang penanaman modal
10. Sosialisasi kepada Investor dan UMKM
11. Gelar potensi dan temu usaha
12. Inventarisir data peluang investasi
13. Kendaraan operasional dan kendaraan pelayanan



14. Pendataan realisasi investasi non fasilitasi dan rumah tangga
15. Penyusunan kebijakn investasi bagi pembangunan fasilitasi infrastruktur
16. Pengembangan sistem informasi perizinan Pelayanan melalui Jaringan Aplikasi penanaman modal

**VII. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan**

1. Survey indek kepuasan masyarakat
2. Sosialisasi Perbup nomor 23 tahun 2013 dan SOP Pelayanan
3. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
4. Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan
5. Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan
6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
7. Operasional penyelenggara perizinan

**VIII. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;**

1. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian masalah investasi
2. Sosialisasi kebijakan penanaman modal
3. Penyusunan SOP
4. Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional
5. Publikasi perizinan penanaman modal
6. Penyederhanaan perizinan Investasi

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut

**RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN OPD TAHUN 2019 e- PLANNING  
DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				550,131,434				771,265,500
1	0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	42,000,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	45,000,000
2	0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksana Program/Kegiatan	67,800,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiatan	90,000,000
3	0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	82,018,500	APBD	Rutinitas	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	25,000,000
4	0 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	IV Jurai	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	15,200,000	APBD	Rutinitas	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	28,000,000
5	1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	32,324,500	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	55,000,000
6	1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	24,870,700	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	18,392,000
7	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	IV Jurai	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	14,831,000	APBD	Rutinitas	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	35,000,000
8	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	37,650,000	APBD	Rutinitas	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	65,000,000

1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	4 eksp koran	13,900,000	APBD	Rutinitas	4 eksp koran	54,873,500
10	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	IV Jurai	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	32,400,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	75,000,000
11	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (luar negeri)	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	98,500,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	150,000,000
12	2	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	54,474,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	85,000,000
13	2	7	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	IV Jurai	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	34,162,734	APBD	Baru	Tersedianya Operasional perencanaan	45,000,000
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			247,425,000				295,000,000
16			Pengadaan Mobil/eur	IV Jurai	Unit	35,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan mobil/eur	50,000,000
17			Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	IV Jurai	2 unit	60,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit	90,000,000
18	2	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV Jurai	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang	97,250,000	APBD	Kegiatan Baru	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	30,000,000

19	2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	IV Jurai	1 mobil dinas, 3 buah kendaraan dinas roda 2	55,175,000	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	125,000,000
21		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				23,500,000				20,000,000
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas operasional pelayanan, harian, hari tertentu, olah raga	23,500,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya pakaian dinas	20,000,000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				50,000,000
22	0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Perizinan	IV Jurai	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	50,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	50,000,000
5		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				378,148,000				222,000,000
23		Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi	Luar Daerah	1 Kali Promosi	213,038,100	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi Investasi	20,000,000
24		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	5 buah Mou	45,000,000	APBD	Rutinitas	Terciptanya kerjasama investasi	65,000,000



25	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tercapainya kerjasama dengan investor	Pessel	4 investor	35,000,000	APBD	baru	Tercapainya kerjasama dengan investor	60,000,000
27	1 3	Pendataan realisasi investasi non fasilitas dan rumah tangga	Pessel	Buku data informasi	27,962,500	APBD	baru	Tersedianya data informasi	32,000,000
28		Pelaksanaan kerjasama investasi	Pessel	MOU	57,147,400	APBD	baru	terlaksananya kerjasama dengan investor	45,000,000
28		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			310,028,000				528,639,400
28		Penyusunan sistem informasi perizinan dan penanaman modal di daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	82,796,200	APBD	Berkelanjutan	Tersedianya Sitem Informasi penanaman modal daerah	250,000,000
29		Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Pessel	20 Badan usaha	53,198,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya fasilitas layanan	92,639,400
31		Pengembangan System Informasi Pelayanan melalui Jaringan Aplikasi Penanaman Modal	Kab. Pessel	Informasi izin	85,000,000	APBD	Baru	Tersedianya sistem informasi	85,000,000
33		Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Kab. Pessel	10 investor	28,074,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya Pengawasan investasi	56,000,000
34		Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Kab. Pessel	12 bulan	60,959,800	APBD	lanjutan	Terlaksananya koordinasi	45,000,000
7		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan			399,891,500				405,000,000

35	Survey indeks kepuasan masyarakat	Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	Pessel	1 Paket		APBD	lanjutan	Tersedianya Quisioner	30,000,000
36	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	Pessel	50 izin	27,588,500	APBD	lanjutan	Terlaksananya monitoring kegiatan	80,000,000
37	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	kecamatan	3 paket	61,003,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya sosialisasi	85,000,000
38	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	tercapainya penuntasan masalah	kecamatan	5 permasalahan	135,000,000	APBD	baru	tercapainya penuntasan masalah	60,000,000
39	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	Pessel	3.000 buah izin	40,500,000	APBD	lanjutan	1500 bahan layanan izin	150,000,000
40	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal	Terlaksananya pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	Pessel	Terlaksananya Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	135,800,000	APBD	lanjutan	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	150,000,000
	<b>TOTAL</b>				<b>2,054,123,934</b>				<b>2,441,904,900</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan serta mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, Kegiatan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparaturnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.